

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perdebatan besar (*great debates*) dalam studi Hubungan Internasional telah menjadi tonggak penting dalam membentuk pemahaman teoretis mengenai dinamika kekuasaan global, khususnya dalam menafsirkan rivalitas kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok di era multipolar saat ini. Salah satu perdebatan utama berlangsung antara pendekatan realisme dan liberalisme. Mazhab realis klasik memandang sistem internasional sebagai arena anarkis tanpa otoritas pusat, di mana negara sebagai aktor utama bertahan hidup melalui kalkulasi rasional untuk mempertahankan kekuasaan dalam lingkungan penuh ketidakpastian (Morgenthau, 1948; Waltz, 1979, Mearsheimer, 2001).

Pendekatan liberal menekankan peran institusi internasional, norma, serta interdependensi ekonomi sebagai penyeimbang konflik dalam hubungan antarnegara (Keohane & Nye, 1977). Namun, kondisi terkini menunjukkan bahwa interdependensi tidak serta – merta menghasilkan stabilitas (Ikenberry, 2018). Sejak 2018, Amerika Serikat telah memberlakukan lebih dari 1.300 sanksi ekonomi terhadap Tiongkok (Hume & Scarpino, 2024). Pada tahun 2023, Amerika Serikat juga mencatat defisit perdagangan sebesar USD 279,1 miliar dari total nilai perdagangan bilateral senilai USD 574,7 miliar (U.S Census Bureau, 2024). Data ini menunjukkan bahwa ekonomi global tetap dibayangi oleh dinamika struktural yang konfliktual, sebagaimana ditekankan oleh perspektif realis.

Dalam konteks tersebut, tatanan liberal berbasis aturan (*rules-based liberal order*) memainkan peran sentral sebagai instrumen hegemonik Amerika Serikat dalam mempertahankan *status quo* global (Ikenberry, 2005). Sejak akhir Perang Dunia II, AS memimpin pembentukan institusi global seperti PBB, IMF, Bank Dunia, WTO, dan NATO sebagai perangkat normatif yang menetapkan standar internasional sesuai dengan kepentingannya (Uddin & Lau, 2023). Melalui kerangka aturan ini, AS tidak hanya mengarahkan jalannya perdagangan, keuangan, dan keamanan global, tetapi juga menjustifikasi tindakan sepihak seperti sanksi ekonomi, kontrol ekspor, dan intervensi politik terhadap negara – negara yang

dianggap menantang dominasinya (Larson, 2022). Tatanan ini memberikan legitimasi moral melalui nilai – nilai keterbukaan dan demokrasi, sekaligus menjadi instrumen strategis untuk menekan pesaing melalui mekanisme sanksi atas pelanggaran aturan (Ikenberry, 2005).

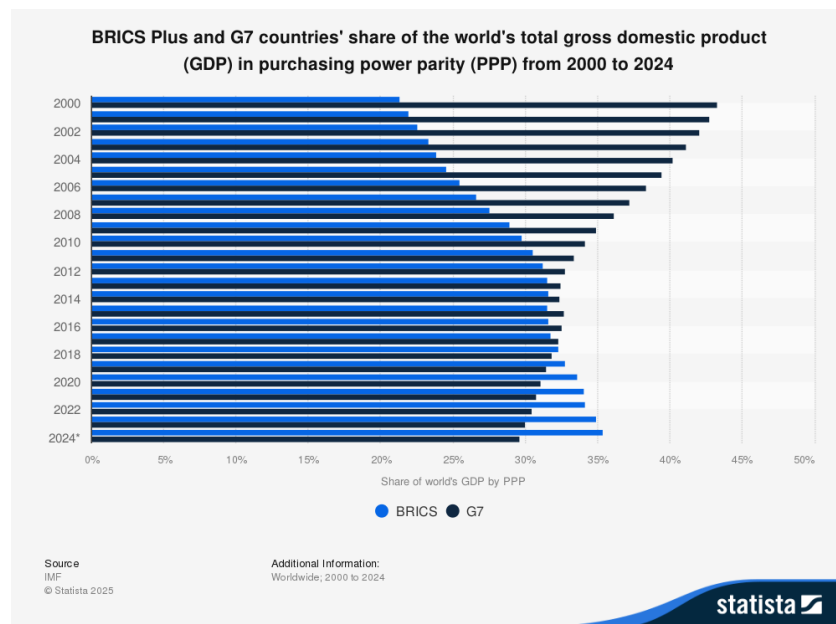
Sistem internasional tengah mengalami pergeseran dari tatanan unipolar yang didominasi Amerika Serikat menuju konfigurasi multipolar, ditandai oleh kebangkitan Tiongkok sebagai *rising power* yang secara aktif menantang dominasi global AS (Liu & He, 2023). Rivalitas kedua negara berakar pada ambisi strategis yang saling bertentangan, perebutan supremasi ekonomi dan politik, serta persaingan nilai dalam membentuk tatanan global (Rolf & Schindler, 2023). Kompetisi ini berlangsung dalam waktu panjang, tidak melalui konfrontasi militer langsung, melainkan melalui tekanan politik dan ekonomi yang turut memengaruhi kalkulasi strategis negara-negara lain, termasuk Indonesia.

Rivalitas tersebut termanifestasi dalam persaingan berbagai proyek strategis. Di bidang pembangunan infrastruktur global, Tiongkok mendorong *Belt and Road Initiative* (BRI) yang telah melibatkan lebih dari 140 negara dengan komitmen investasi lebih dari USD 1 triliun (Nedopil, 2025). Sebagai tandingan, Amerika Serikat memprakarsai *Indo-Pacific Economic Framework* (IPEF) yang menggandeng 14 negara mitra dengan fokus pada rantai pasok dan ekonomi digital (USTR, 2024). Di ranah perdagangan, perang dagang memanasi sejak 2018 ketika AS mengenakan tarif miliaran dolar terhadap produk Tiongkok, yang kemudian dibalas oleh Tiongkok melalui kebijakan tarif serupa yang memicu ketidakpastian dalam rantai pasok global (CSIS, 2025). Persaingan juga merambah ke sektor keuangan global, di mana BRICS mendorong dedolarisasi melalui sistem pembayaran alternatif seperti *Cross-Border Interbank Payment System* (CIPS) serta peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional (Reuters, 2024).

Pada level aliansi multilateral, dinamika kompetisi semakin tajam. BRICS, yang menyumbang lebih dari 32% PDB global, 18% perdagangan dunia, dan sekitar 25% aliran FDI (Gouvea & Gutierrez, 2023), diposisikan sebagai simbol *soft balancing* terhadap dominasi Barat. Transformasi menjadi BRICS+ dengan

masuknya negara-negara seperti Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab memperkuat posisi forum ini sebagai penyeimbang G7, serta merepresentasikan hampir 40% populasi dunia (Reuters, 2023). Secara struktural, kekuatan ekonomi BRICS terus meningkat signifikan. Menurut data dari (Statista, 2025) yang merujuk pada IMF, negara-negara BRICS melampaui pangsa G7 dalam total Produk Domestik Bruto (PDB) dunia berdasarkan paritas daya beli (PPP) sejak tahun 2018. Pada tahun 2024, BRICS menguasai sekitar 35 persen PDB dunia, sedangkan G7 hanya menyumbang 30 persen. Perbedaan ini semakin menegaskan posisi BRICS sebagai kekuatan ekonomi kolektif yang secara riil mampu menyaingi dominasi Barat dalam tatanan ekonomi global.

Gambar 1.1 PDB Global BRICS dan G7 Berdasarkan PPP Tahun 2000–2024



Sumber: (Statista, 2025); berdasarkan data IMF

Sementara itu, G7 tetap berperan sebagai koalisi negara-negara maju yang mempertahankan tatanan liberal berbasis aturan (Stuenkel, 2024). Dalam konteks ini, konstelasi BRICS dan G7 tidak hanya merepresentasikan perbedaan aliansi ekonomi, tetapi juga simbol dari pertarungan ideologis dan kepentingan struktural global. Dalam konfigurasi geopolitik yang semakin terpolarisasi, negara – negara berkembang seperti Indonesia tidak lagi sekadar menjadi penonton, melainkan

dituntut memainkan peran sebagai aktor strategis yang mampu menavigasi tekanan sekaligus memanfaatkan peluang dari rivalitas dua kekuatan utama tersebut.

Sebagai negara dengan populasi, ekonomi, dan sumber daya alam terbesar di Asia Tenggara, dengan PDB mencapai USD 1,3 triliun pada 2022 (Kementerian PPN/ Bappenas, 2023) memegang peran penting dalam percaturan geopolitik Indo-Pasifik. Sejak kemerdekaan, Indonesia mengedepankan prinsip politik luar negeri bebas-aktif untuk menjaga otonomi dalam pengambilan keputusan dan menghindari keberpihakan terhadap blok kekuatan besar (Sadewa & Hakiki, 2023). Namun, eskalasi rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah mempersempit ruang fleksibilitas kebijakan ini, menempatkan Indonesia dalam dilema strategis yang menuntut kalkulasi kebijakan luar negeri yang semakin presisi dan rasional.

Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Tiongkok mencerminkan dinamika kemitraan strategis yang kompleks, dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan dari dua kekuatan global tersebut. Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai USD 23,25 miliar pada 2023 dan mencatatkan surplus perdagangan sebesar USD 11,97 miliar (IBC Bulletin, 2024; BPS, 2024). Komoditas ekspor utama Indonesia ke AS meliputi tekstil, karet, dan produk kelapa sawit. Di sektor investasi, Amerika Serikat menanamkan modal sekitar USD 582 juta ke Indonesia sepanjang tahun 2024 (Bank Indonesia, 2024). Laporan *AmCham Indonesia & U.S. Chamber of Commerce* mencatat bahwa investasi AS selama ini berfokus pada sektor teknologi informasi, energi bersih, serta infrastruktur digital strategis, termasuk pembangunan pusat data (AmCham Indonesia & U.S. Chamber of Commerce, 2024).

Meski demikian, hubungan bilateral ini juga diwarnai ketegangan, terutama akibat kebijakan hilirisasi Indonesia seperti larangan ekspor bijih nikel yang diprotes oleh sejumlah mitra dagang, termasuk Amerika Serikat, karena dinilai merugikan kepentingan industri baja dan logam mereka. Sengketa ini dibawa ke WTO oleh Uni Eropa pada 2019, dan Amerika Serikat turut bergabung dalam proses konsultasi formal (WTO, 2022). Pada akhir 2022, panel WTO menyatakan

bahwa kebijakan Indonesia melanggar aturan perdagangan internasional, meskipun pemerintah Indonesia tetap melanjutkan kebijakan hilirisasi dan mengajukan banding (Reuters, 2022).

Di sisi lain, AS juga menyuarakan kekhawatiran terhadap ketergantungan Indonesia pada investasi Tiongkok, mengingat sekitar 90% proyek smelter nikel di Indonesia dikuasai oleh perusahaan asal Tiongkok (Indonesia Business Post, 2022). Hal ini semakin menegaskan bagaimana posisi Indonesia berada dalam dilema strategis antara memenuhi kepentingan nasional dan merespons tekanan dari dua kekuatan besar dunia.

Hubungan Indonesia–Tiongkok menunjukkan tingkat keterikatan ekonomi yang semakin dalam. Pada tahun 2023, nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok mencapai USD 64,94 miliar, menjadikannya mitra dagang terbesar Indonesia (BPS, 2024). Ekspor tersebut didominasi oleh komoditas tambang dan energi seperti *ferroalloys* (20,4%), *lignite* (14,4%), *coal briquettes* (9,6%), dan *nickel mattes* (7,5%), serta produk kelapa sawit seperti *palm oil* (5,4%) dan *stearic acid* (2,4%) (OEC, 2024). Di sisi lain, impor Indonesia dari Tiongkok mencapai USD 62,88 miliar, sehingga Indonesia mencatatkan surplus perdagangan sebesar USD 2,05 miliar.

Tabel 1.1 Tabel Perdagangan Indonesia–AS dan Tiongkok (2023)

Mitra Dagang	Ekspor Indonesia (USD miliar)	Impor Indonesia (USD miliar)	Neraca Dagang (USD miliar)	Komoditas Utama
Amerika Serikat (AS)	23.251,3	11.277,5	11,969.4	Tekstil, karet, kelapa sawit
Tiongkok	64.938,7	62.880,9	2,053.7	<i>Ferroalloys</i> , <i>lignite</i> , <i>coal briquettes</i> , kelapa sawit

Sumber: Diolah dari Bank Indonesia (2024), BPS (2024), OEC (2024), IBC Bulletin (2024)

Di bidang investasi, Tiongkok merupakan aktor dominan dalam proyek strategis seperti Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB), yang menjadi bagian dari

investasi BRI senilai USD 9,3 miliar ke Indonesia pada 2024. Investasi ini mencakup proyek berskala besar di sektor energi, transportasi, dan pertambangan, termasuk pembangunan smelter nikel (Nedopil, 2025: 7). Meskipun relasi ekonomi ini tampak saling menguntungkan, utang Indonesia kepada kreditor Tiongkok telah mencapai lebih dari USD 22 miliar pada awal 2022, termasuk pembiayaan proyek KCJB (Rakhmat, 2022). Jumlah ini meningkat menjadi sekitar USD 23 miliar menjelang 2023 seiring bertambahnya proyek infrastruktur BRI di Indonesia (Shofa, 2023). Kondisi ini memunculkan kekhawatiran dari sebagian pengamat mengenai potensi *debt-trap diplomacy*, di mana ketergantungan pada pembiayaan luar negeri berisiko mengurangi ruang manuver politik dan ekonomi Indonesia.

Kompleksitas hubungan semakin nyata dengan munculnya klaim Tiongkok atas wilayah Laut Natuna Utara yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Klaim sembilan garis putus (*nine-dash line*) tersebut dianggap bertentangan dengan ketentuan UNCLOS 1982 dan menyebabkan tumpang tindih wilayah seluas sekitar 50.000 km² dengan ZEE Indonesia (Andi et al., 2024). Fakta ini menegaskan bahwa kedekatan ekonomi antara kedua negara tidak serta – merta menjamin keselarasan dalam aspek politik dan keamanan maritim.

Kondisi geopolitik ini semakin diperumit dengan persaingan kepentingan langsung Amerika Serikat dan Tiongkok terhadap Indonesia. Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok dalam konteks Indonesia juga diperkuat oleh kepentingan strategis masing-masing pihak. Lokasi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik menjadikannya pemain utama yang potensial dalam persaingan geopolitik dan geostrategis AS-Tiongkok (Zhen, 2022). Bagi Amerika Serikat, Indonesia memiliki arti penting dalam menjaga stabilitas jalur pelayaran di Selat Malaka (Medeiros, 2020) serta sebagai sumber nikel yang krusial bagi industri pertahanan dan transisi energi terbarukan (IEA, 2021). Sementara itu, bagi Tiongkok, Indonesia merupakan mata rantai vital dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik (EV) (Setiawan, 2025), terutama melalui penguasaan pasokan nikel yang diperoleh dari investasi besar-besaran di sektor pertambangan dan smelter. Kondisi ini menempatkan Indonesia pada persimpangan kepentingan

ekonomi-politik global, yang memperkuat kompleksitas dalam merumuskan kebijakan luar negeri yang berimbang dan adaptif.

Rivalitas dua kekuatan besar ini turut mengubah dinamika kerja sama multilateral. Polarisasi yang meningkat mendorong negara – negara berkembang untuk memperluas partisipasi dalam forum alternatif. Indonesia, sebagai negara yang konsisten menjunjung prinsip bebas–aktif dan mendukung multilateralisme, memandang kerja sama multilateral sebagai sarana penting untuk memperkuat ketahanan nasional, mendorong investasi, dan menggalang solidaritas dalam menghadapi tantangan global seperti krisis pangan dan pembangunan berkelanjutan (Wono et al., 2022).

Dalam konteks ini, BRICS dipandang oleh Indonesia sebagai *platform* strategis untuk memperluas ruang diplomasi. Forum ini telah berkembang menjadi bentuk solidaritas negara – negara *Global South* dalam memperjuangkan reformasi tatanan ekonomi global yang lebih adil (Duggan et al., 2022). Melalui inisiatif seperti *New Development Bank* (NDB) dan *Contingent Reserve Arrangement* (CRA), BRICS menawarkan jalur pembiayaan alternatif bagi negara berkembang (Nurifqi et al., 2024). Organisasi ini juga mendorong kerja sama perdagangan dan reformasi kelembagaan global agar lebih inklusif, sejalan dengan visi multipolaritas dan penguatan kerja sama Selatan–Selatan (Mercy Uzoma et al., 2024: 155). Bagi Indonesia, keterlibatan dalam BRICS tidak hanya mencerminkan strategi diversifikasi hubungan luar negeri, tetapi juga merupakan bentuk kalkulasi rasional untuk menghindari ketergantungan berlebihan pada kekuatan besar tertentu. Dengan bergabung dalam forum ini, Indonesia memperoleh ruang manuver strategis dalam merespons tekanan sistem internasional yang semakin terpolarisasi.

Langkah BRICS memicu respons keras dari Amerika Serikat. Presiden Trump, misalnya, memperingatkan bahwa negara – negara BRICS yang menantang dominasi dolar AS dapat dikenakan tarif hingga 100% (Shakil, 2025). Ancaman ini bukan semata retorika, karena pada tahun yang sama, Indonesia telah dikenakan tarif baru sebesar 32% terhadap komoditas ekspor tertentu seperti nikel dan tekstil (Yuniar, 2025). Fakta ini menunjukkan bahwa risiko politik dan ekonomi terhadap Indonesia sudah mulai direalisasikan, sehingga harus diperhitungkan secara serius

dalam kalkulasi kebijakan luar negeri. Tekanan semacam ini memperjelas bahwa setiap langkah Indonesia dalam forum multilateral seperti BRICS tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuatan global yang sarat dengan potensi pembalasan ekonomi. Oleh karena itu, keputusan untuk bergabung harus dilihat sebagai strategi yang penuh perhitungan dalam menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua kutub kekuatan besar tersebut.

Keputusan Indonesia untuk menjadi anggota penuh BRICS pada 6 Januari 2025 (Ministério Das Relações Exteriores, 2025) merefleksikan kalkulasi rasional dalam menghadapi polarisasi global. Langkah ini menegaskan peran aktif Indonesia dalam membentuk arsitektur global yang lebih seimbang dan representatif, sekaligus memperluas ruang manuver di tengah rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok. Melalui keanggotaan BRICS, Indonesia tidak hanya berupaya memperoleh keuntungan ekonomi dan politik, tetapi juga mencari *voice opportunity* yakni kesempatan untuk menyuarakan kepentingan nasionalnya dalam proses pengambilan keputusan global. Dengan demikian, keputusan ini mencerminkan upaya rasional Indonesia untuk tidak terjebak dalam dominasi kekuatan besar, sekaligus menegaskan posisinya apakah sebagai kekuatan *status quo* atau justru memiliki kecenderungan revisionis terhadap tatanan internasional.

Langkah tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan strategis yang mendalam: mengapa Indonesia memilih untuk masuk ke dalam forum yang kerap dipersepsikan sebagai tantangan terhadap dominasi Barat, sementara pada saat yang sama tetap menjaga hubungan erat dengan Amerika Serikat dan Tiongkok? Keputusan ini dapat membuka peluang sekaligus risiko, termasuk kemungkinan tekanan ekonomi atau politik dari aktor besar seperti Amerika Serikat. Dari sudut pandang awal, pilihan ini terlihat kontradiktif dan bahkan ambigu secara strategis, karena di satu sisi berpotensi memperkeruh rivalitas struktural, tetapi di sisi lain dapat menjadi instrumen adaptif Indonesia untuk menavigasi tekanan global dan menjaga stabilitas kawasan.

Literatur hubungan internasional menempatkan negara yang bergabung dengan forum non-Barat seperti BRICS sebagai aktor *revisionist*, sementara negara yang tetap berorientasi pada tatanan liberal internasional dianggap sebagai *status*

quo seeker (Buzan & Lawson, 2014). Namun, dalam konteks Indonesia, kategori tersebut tidak sepenuhnya tegas. Keputusan ini tampak lebih sebagai hasil kalkulasi rasional yang lahir dari tekanan struktural sistem internasional, sehingga sulit diklasifikasikan secara biner antara *revisionist* dan *status quo*.

Meskipun telah banyak kajian yang membahas posisi Indonesia dalam kerja sama BRICS maupun dinamika rivalitas AS–Tiongkok, belum banyak studi yang secara sistematis mengkaji keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS sebagai strategi respons terhadap tekanan struktural global menggunakan pendekatan rasionalitas aktor dan kerangka *revisionist versus status quo*. Anomali inilah yang menjadi dasar utama penelitian ini: apakah keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS mencerminkan kecenderungan *revisionist* moderat, atau justru merupakan strategi adaptif untuk mempertahankan fleksibilitas dalam menghadapi tekanan rivalitas dua kekuatan besar?

Sejalan dengan itu, judul penelitian ini, “*Rasionalitas dan Motif Keputusan Indonesia dalam Keanggotaan BRICS di Tengah Rivalitas AS–Tiongkok*”, disusun berdasarkan konteks kompleks tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kalkulasi rasional Indonesia dalam menentukan sikap terhadap BRICS dibentuk oleh dinamika struktural global, serta untuk mengevaluasi motif strategis Indonesia melalui kerangka *revisionist versus status quo*. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami strategi diplomasi negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi teoritis terhadap kajian hubungan internasional dengan menilai peran forum multilateral non-Barat sebagai instrumen strategi luar negeri di tengah rivalitas dua kekuatan besar dunia.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan menjawab pertanyaan berikut:

- 1. Bagaimana rasionalitas keputusan Indonesia menjadi anggota BRICS dapat dijelaskan melalui Model Aktor Rasional (RAM)?**
- 2. Apakah perilaku Indonesia dalam keanggotaan BRICS menunjukkan motif *revisionist* terhadap tatanan internasional, atau**

justru mencerminkan sikap *status quo seeker* di tengah dominasi global Amerika Serikat dan Tiongkok?

1.3 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Untuk memastikan fokus analisis tetap tajam dan tidak meluas ke aspek – aspek yang tidak relevan dengan tujuan penelitian, maka ditetapkan beberapa batasan waktu, lokasi dan aspek – aspek isu sebagai berikut:

1) Batasan Waktu

Penelitian ini mencakup periode 2019–2025, yaitu ketika rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok semakin meningkat dan minat Indonesia terhadap BRICS mulai menguat hingga berujung pada keputusan resmi bergabung.

2) Batasan Lokasi

Unit analisis utama penelitian ini adalah Indonesia, dengan menelaah kebijakan luar negeri Indonesia terkait keanggotaan BRICS dalam konteks rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok. Negara lain, seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, hanya dibahas sebagai bagian dari konteks sistem internasional, bukan sebagai objek utama. Analisis dilakukan pada level negara (*state-level analysis*) tanpa membahas secara mendalam kinerja institusi BRICS maupun peran aktor individu.

3) Batasan Isu

Penelitian ini membatasi ruang lingkup rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok hanya pada aspek yang berkaitan langsung dengan keputusan Indonesia menjadi anggota BRICS. Fokus utama diarahkan pada dimensi ekonomi dan geopolitik, khususnya dominasi sistem keuangan global, inisiatif dedolarisasi BRICS, serta posisi strategis Indonesia dalam merespons konfigurasi kekuatan global melalui forum multipolar. Rivalitas militer, politik domestik, maupun isu lain yang tidak relevan secara langsung terhadap keanggotaan Indonesia dalam BRICS tidak dibahas, agar analisis tetap terfokus pada rasionalitas dan motif kebijakan luar negeri Indonesia.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses pengambilan keputusan Indonesia menjadi anggota BRICS melalui pendekatan Model Aktor Rasional (RAM).
2. Mengkaji apakah motif Indonesia dalam keanggotaan BRICS mencerminkan sikap *revisionist* atau *status quo seeker* sebagai respons terhadap rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung dua kegunaan utama, yaitu teoritis dan praktis, dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi setiap pembacanya, antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam analisis pengambilan keputusan negara melalui pendekatan Model Aktor Rasional (RAM) dan neorealisme struktural. Dengan memadukan kerangka RAM, neorealisme, serta konsep *status quo vs. revisionist power*, penelitian ini menawarkan pemahaman teoretis yang lebih tajam mengenai bagaimana negara non-hegemonik seperti Indonesia merespons tekanan sistem internasional melalui forum multipolar seperti BRICS. Selain itu, penelitian ini memperkaya diskursus teoritis tentang strategi kebijakan luar negeri dengan memperkenalkan konsep *voice opportunity* (Joseph Grieco), yang menegaskan Indonesia untuk menentukan pilihannya sendiri di tengah rivalitas AS–Tiongkok. Lebih lanjut, penelitian ini menyoroti pertarungan ide antara liberal order dan multipolaritas serta memperkaya analisis perbandingan posisi institusional BRICS dan OECD, guna menjelaskan dinamika transisi kekuasaan global.

2. Kegunaan Praktis

1) Bagi Penulis

Secara nyata penelitian ini bertujuan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ilmu Hubungan Internasional Universitas Pasundan. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana pengembangan kemampuan analitis penulis dalam memahami dinamika kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya dalam konteks keterlibatan pada forum kerja sama non-Barat seperti BRICS.

2) Bagi Universitas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi yang bermanfaat bagi koleksi perpustakaan, sekaligus sebagai bahan perbandingan atau acuan bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi objek penelitian serupa di masa mendatang.

1.5 Kerangka Teoritis – Konseptual

Dalam perumusan kebijakan luar negeri, pertanyaan kunci sering muncul: mengapa suatu negara memilih kebijakan tertentu dibandingkan alternatif lain? Dalam konteks ini, keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS perlu dianalisis sebagai bagian dari respon strategis terhadap rivalitas AS–Tiongkok. Untuk menjawab hal tersebut, penelitian ini menggunakan Model Aktor Rasional (RAM) sebagai kerangka analisis utama untuk menganalisis pertimbangan rasional Indonesia dalam keputusan bergabung dengan BRICS. Sebagai pelengkap, neorealisme struktural, *voice opportunity*, dan konsep *revisionist vs status quo power* diaplikasikan untuk memahami konteks sistemik dan strategi Indonesia melalui keterlibatan dalam BRICS di tengah tatanan internasional yang multipolar. Dengan kombinasi kerangka ini, diharapkan penelitian ini mampu menguraikan faktor – faktor rasional dan struktural yang membentuk arah kebijakan luar negeri Indonesia. Penjelasan lebih lanjut mengenai pendekatan – pendekatan tersebut akan disampaikan pada bagian berikut.

1.5.1 Analisis Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan instrumen strategis suatu negara dalam merespons dinamika eksternal sekaligus mewujudkan kepentingan nasional di

kancah internasional. Secara konseptual, kebijakan luar negeri dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh aktor negara dalam hubungannya dengan aktor eksternal, baik melalui hubungan bilateral maupun partisipasi dalam forum multilateral (Bojang, 2018; Carlsnaes, 2002). Dalam dunia yang semakin multipolar, perumusan kebijakan luar negeri tidak dapat dilepaskan dari interaksi kompleks antara faktor struktural global dan faktor domestik seperti stabilitas politik, orientasi ekonomi, serta persepsi elite pengambil keputusan.

Pendekatan penting dalam studi kebijakan luar negeri dikembangkan oleh Snyder, Bruck, dan Sapin (1954), yang menekankan bahwa kebijakan luar negeri harus dianalisis dengan mempertimbangkan konteks institusional dan persepsi pembuat keputusan. Mereka menyatakan bahwa untuk memahami “mengapa” suatu negara mengambil kebijakan tertentu, diperlukan analisis terhadap proses pengambilan keputusan itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Snyder, Bruck, dan Sapin:

“Kami percaya bahwa fenomena yang biasanya dipelajari dalam bidang politik internasional dapat ditafsirkan dan dikaitkan secara bermakna melalui [pendekatan pengambilan keputusan] sebagaimana yang akan kami sampaikan... Namun, jika seseorang ingin menyelidiki pertanyaan ‘mengapa’ yang mendasari peristiwa, kondisi, dan pola interaksi yang bergantung pada tindakan negara, maka analisis pengambilan keputusan tentu diperlukan.” (Snyder, Bruck, & Sapin, 1962:33, diterjemahkan dari (Hudson, 2005: 4)).

Kebijakan luar negeri tidak semata-mata ditentukan oleh tekanan sistem internasional secara deterministik, tetapi merupakan produk dari kalkulasi rasional, persepsi, dan pertimbangan strategis yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan dalam kerangka institusi negara (Carlsnaes, 2002; Hudson, 2005). Sumber pengaruh dalam proses ini ditunjukkan oleh Snyder, dapat berasal dari dua setting utama: *internal setting* seperti kebutuhan ekonomi domestik dan stabilitas politik, serta *external setting* seperti tekanan rivalitas kekuatan besar dan struktur sistem internasional (dikutip dari Rosenau, 1966: 195; Rosyidin, 2011: 152)

Pendekatan ini relevan untuk menjelaskan bagaimana Indonesia sebagai aktor institusional merespons rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok melalui keputusan strategis bergabung dengan BRICS. Walaupun studi ini tidak secara

eksplisit mengkaji individu pengambil keputusan, negara diposisikan sebagai unit analisis utama yang membuat kalkulasi berdasarkan tekanan eksternal dan kepentingan domestik. Keputusan ini dapat dipahami bukan sebagai upaya mendeterminasi arah tatanan global, melainkan sebagai strategi adaptif untuk menjaga fleksibilitas politik luar negeri, mengelola ketergantungan, serta memanfaatkan peluang ekonomi-politik yang muncul di tengah pergeseran menuju multipolaritas.

Dengan demikian, analisis kebijakan luar negeri berfungsi sebagai fondasi awal untuk mengintegrasikan teori-teori yang lebih spesifik seperti Model Aktor Rasional (RAM), neorealisme struktural, *voice opportunity*, dan *konsep status quo vs revisionist power*. Melalui kerangka ini, penelitian dapat menyoroti posisi Indonesia yang adaptif: menjaga komitmen pada tatanan internasional yang ada, sekaligus membuka ruang bagi kemungkinan suara alternatif dalam dinamika pertarungan ide dan tatanan global.

1.5.2 Model Aktor Rasional (RAM)

Model Aktor Rasional (*Rational Actor Model*/RAM), yang diperkenalkan oleh Graham T. Allison (1971) sebagai Model I, merupakan salah satu pendekatan dominan dalam studi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa negara bertindak sebagai aktor tunggal yang rasional, yang membuat keputusan berdasarkan kalkulasi yang logis untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Allison, 1969). RAM berakar pada teori permainan dan pendekatan ekonomi rasional yang berkembang pada era Perang Dingin, dan memandang kebijakan luar negeri sebagai hasil dari tindakan sadar negara untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko dalam sistem internasional yang anarkis dan penuh ketidakpastian (Allison, 1969; Hill, 2003).

Dalam kerangka ini, negara dipandang seperti individu rasional: ia memiliki tujuan (*goals*), mengevaluasi berbagai alternatif (*options*), memprediksi konsekuensi dari tiap pilihan (*consequences*), dan akhirnya memilih alternatif terbaik (*choice*) yang paling menguntungkan secara strategis (Allison & Zelikow, 1999). RAM menyajikan kerangka sistematis yang mempermudah analisis proses keputusan negara melalui empat tahap rasional tersebut. Dalam pendekatan ini,

kebijakan luar negeri dipahami sebagai “*policy as national choice*” yang merupakan hasil dari kalkulasi strategis berbasis informasi dan kepentingan yang tersedia saat keputusan diambil (Hill, 2003: 92).

Secara teoretis, RAM sangat relevan untuk menjelaskan kebijakan luar negeri negara-negara *middle power* seperti Indonesia yang harus menyesuaikan diri dan berhati-hati dalam menavigasi rivalitas dua kekuatan besar: Amerika Serikat dan Tiongkok. Dalam konteks ini, RAM menjadi alat analitis untuk menjawab pertanyaan mendasar: apakah keputusan Indonesia untuk bergabung sebagai anggota penuh BRICS merupakan pilihan rasional yang memperhitungkan konfigurasi kekuasaan global? Dengan menggunakan kerangka ini, peneliti dapat menelaah bagaimana Indonesia mengevaluasi manfaat ekonomi, risiko geopolitik, serta implikasi diplomatik dari keputusannya secara rasional dan terstruktur.

Dalam penelitian ini, RAM digunakan sebagai kerangka utama untuk menganalisis proses pengambilan keputusan Indonesia dalam keanggotaannya di BRICS tahun 2025. Keputusan tersebut dipandang bukan sebagai respons simbolik atau ideologis, melainkan sebagai hasil kalkulasi rasional dalam merespons perubahan struktur global, membaca potensi keuntungan ekonomi-politik dari BRICS, serta menjaga fleksibilitas strategis dan otonomi kebijakan luar negeri. Evaluasi ini mencakup empat komponen utama RAM (Allison, 1969), yaitu:

- 1) *Goals and Objectives*, negara merumuskan tujuan strategis sebagai dasar kebijakan luar negeri. Dalam konteks Indonesia, tujuan tersebut mencakup diversifikasi mitra strategis, perluasan pengaruh ekonomi di Global South, dan pencarian alternatif pembiayaan di luar hegemoni institusi keuangan Barat (Gindarsah, 2017).
- 2) *Options*, pemerintah mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang tersedia. Indonesia menghadapi beberapa opsi, mulai dari mempertahankan netralitas, memperkuat kerja sama dengan AS, hingga bergabung dengan forum alternatif seperti BRICS.

- 3) *Consequences*, setiap pilihan dianalisis berdasarkan potensi dampak jangka pendek dan panjang. Dalam hal ini, pemerintah menimbang konsekuensi geopolitik, risiko sanksi, manfaat ekonomi, serta dampaknya terhadap relasi bilateral dengan kekuatan besar (Jones, 2023).
- 4) *Choice*, negara akhirnya memilih opsi yang paling rasional dan sesuai dengan kepentingan jangka panjang. Keputusan untuk bergabung dengan BRICS muncul sebagai opsi yang dinilai paling rasional untuk memperoleh *leverage* internasional tanpa harus berpihak secara mutlak pada blok manapun.

Dengan demikian, RAM berfungsi tidak hanya sebagai alat klasifikasi kebijakan, tetapi juga sebagai instrumen teoretis yang mengungkap kalkulasi strategis negara dalam merespons tekanan sistemik global. Dalam studi ini, RAM memberikan kerangka analitis yang solid untuk menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai *middle power*, berusaha menavigasi rivalitas AS–Tiongkok melalui kalkulasi yang terukur dan responsif terhadap tekanan global.

1.5.3 Politik Internasional

Politik internasional merupakan salah satu *core subject* dari studi hubungan internasional yang berfokus pada interaksi strategis antarnegara dalam sistem internasional yang bersifat anarkis. Dalam sistem ini, tidak ada otoritas tertinggi yang mengatur perilaku negara, sehingga masing-masing negara dituntut untuk bertindak secara rasional guna mempertahankan eksistensi dan kepentingan nasionalnya (Waltz, 1979).

Sebagaimana ditegaskan oleh Holsti, politik internasional merupakan medan kompetisi strategis di mana negara – negara secara dinamis merespons ancaman dan peluang yang lahir dari distribusi kekuasaan global (Holsti, 1983 dikutip dalam Affianty, 2016). Interaksi dalam sistem ini bersifat dinamis dan strategis, yang berarti bahwa setiap tindakan suatu negara akan memicu reaksi dari aktor lain, membentuk pola hubungan kompleks yang sebagian besar ditentukan oleh tekanan struktural, seperti distribusi kekuasaan global, selain pertimbangan kepentingan nasional, persepsi ancaman, serta pergeseran kapabilitas relatif (Chong, 2023; Zagare, 1990). Dengan demikian, kebijakan luar negeri tidak dapat dipisahkan dari logika struktural ini, karena menjadi instrumen rasional negara

untuk mempertahankan atau memperluas pengaruh dalam lingkungan yang kompetitif.

Politik internasional tidak hanya berkaitan dengan kebijakan luar negeri sebagai tindakan semata, tetapi juga mencakup orientasi strategis, peran nasional, tujuan eksternal, hingga aksi konkret negara dalam rangka menyesuaikan diri terhadap dinamika eksternal (Dugis, 2004). Dalam pendekatan politik internasional, negara tetap menjadi aktor utama, dan kebijakannya dipandang sebagai hasil dari kalkulasi yang bersifat responsif dan adaptif terhadap tekanan sistemik, seperti perubahan struktur kekuasaan dan ketegangan antarblok kekuatan (Diermeier, 2008; Morgenthau, 1948). Dalam hal ini, kebijakan luar negeri dianggap sebagai bagian dari strategi eksternal negara untuk mengelola hubungan kekuasaan, mempertahankan fleksibilitas, dan menciptakan stabilitas atau keuntungan dalam sistem global.

Pendekatan politik internasional digunakan untuk membingkai bagaimana rivalitas struktural antara Amerika Serikat dan Tiongkok, sebagai dua kekuatan besar dengan agenda global yang saling bertentangan, membentuk tekanan terhadap negara–negara seperti Indonesia (Liu & Kai, 2023; Mearsheimer, 2001). Persaingan tersebut tidak hanya berlangsung di bidang militer, tetapi juga dalam ranah ekonomi, institusi keuangan global, teknologi, dan kontestasi tatanan internasional (*contestation of order*) (Gutierrez, 2023; Uzoma, 2024). Melalui forum seperti BRICS, muncul bentuk baru diplomasi kolektif dari negara–negara non-Barat yang ingin menegosiasikan ulang posisi mereka dalam sistem global (Duggan et al., 2022).

Indonesia, sebagai negara dengan peran *middle power* dan prinsip bebas–aktif, berhadapan dengan dilema strategis dalam menavigasi struktur multipolar yang sedang berkembang. Pilihan Indonesia untuk mendekati BRICS lebih merefleksikan respon adaptif terhadap tekanan struktural global, yaitu upaya memperluas ruang strategis eksternal, memperkuat posisi tawar terhadap kekuatan besar, sekaligus menjaga keseimbangan hubungan dengan blok dominan seperti Amerika Serikat (Plagemann, 2024; Setiawan, 2025). Oleh karena itu, pendekatan politik internasional membantu menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri

Indonesia dalam BRICS bukan sekadar ekspresi ekonomi, tetapi juga manifestasi dari strategi adaptif dan responsif Indonesia dalam lanskap kekuasaan global yang terus berubah, sekaligus membuka peluang untuk bersuara dalam kontestasi tatanan global (*voice opportunity*).

1.5.4 Neorealisme Struktural

Teori Neorealisme Struktural yang dikembangkan oleh Kenneth Waltz (1979) menawarkan kerangka analitis yang kokoh untuk memahami perilaku negara dalam sistem internasional yang bersifat anarkis, yakni ketiadaan otoritas tertinggi yang mengatur interaksi antarnegara (Waltz, 1979). Dalam sistem ini, negara merupakan aktor utama yang bertindak secara rasional untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya melalui mekanisme *self-help* (Grieco, 1988a; Waltz, 1979). Perilaku negara ditentukan lebih oleh posisi dan kapabilitas relatifnya dalam struktur kekuasaan global daripada karakteristik domestik.

Waltz mengidentifikasi tiga elemen utama dalam struktur sistem internasional: (1) anarki, sebagai kondisi tanpa otoritas sentral; (2) keseragaman fungsi, yang berarti semua negara memiliki fungsi dasar yang sama, yaitu bertahan hidup (*survival*); dan (3) distribusi kapabilitas, yaitu penyebaran kekuatan ekonomi, militer, dan politik antarnegara. Dalam logika struktural ini, negara cenderung mengambil tindakan serupa, seperti *balancing* atau *bandwagoning*, bukan karena kesamaan ideologi atau nilai, melainkan karena adanya dorongan sistemik yang mendorong respons strategis serupa terhadap lingkungan internasional yang kompetitif dan hirarkis (Waltz, 1987; Waltz, 1979: 93-99).

Rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok mencerminkan dinamika transisi kekuasaan global, di mana hegemon yang mengalami erosi pengaruh (AS) harus merespons kebangkitan kekuatan baru (Tiongkok) yang menantang dominasi yang telah mapan (Organski & Kugler, 1981). Ketegangan seperti ini menghasilkan tekanan struktural terhadap negara-negara menengah seperti Indonesia, yang cenderung menyesuaikan kebijakan luar negerinya secara adaptif untuk mempertahankan ruang manuver, meminimalkan risiko, dan tetap memperoleh keuntungan dari perubahan sistem global (Plagemann, 2024).

Selain itu, rivalitas struktural ini bukan hanya soal distribusi kekuatan, tetapi juga kontestasi legitimasi tatanan global (*contestation of order*), di mana AS mempertahankan *liberal order*, sementara China dan forum BRICS menawarkan alternatif order. BRICS muncul sebagai respons institusional kolektif negara-negara berkembang untuk menegosiasikan ulang posisi mereka dalam struktur kekuasaan global (Mercy Uzoma et al., 2024).

Indonesia, sebagai negara berkapabilitas menengah (*middle power*) dan penganut prinsip bebas-aktif, menghadapi dilema strategis: mendekat ke BRICS dapat memperkuat posisi ekonomi dan memperluas ruang diplomatik, namun juga berisiko mempengaruhi hubungan dengan kekuatan dominan seperti AS. Pilihan ini lebih tepat dipahami sebagai strategi adaptif/responsif, bukan determinatif. Dengan demikian, Indonesia tetap menjaga fleksibilitas kebijakan luar negeri, meminimalkan risiko, dan membuka ruang peluang diplomatik serta ekonomi di tengah tekanan struktural multipolar.

Pendekatan neorealisme struktural ini memberikan fondasi teoretis yang kuat untuk memahami perilaku negara menengah dalam menghadapi ketidakpastian global. Keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS dapat dilihat sebagai kalkulasi rasional dalam menavigasi tekanan sistemik dan kontestasi tatanan global, sekaligus menunjukkan kapasitas adaptif negara untuk merespons perubahan distribusi kekuasaan dan ide dalam sistem internasional multipolar.

1.5.5 Voice Opportunity

Konsep *voice opportunity* yang diperkenalkan Joseph Grieco (1988) lahir dari perdebatan antara realisme dan neoliberalisme institusional. Konsep ini menegaskan bahwa negara, khususnya yang memiliki kapabilitas terbatas, akan lebih bersedia terlibat dalam institusi internasional apabila mereka memperoleh kesempatan untuk menyuarakan kepentingannya (*voice*) dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana ditegaskan oleh Grieco, “*states will participate in international institutions not merely for the benefits of cooperation, but also when they retain the ability to voice their concerns and defend their interests in the decision-making process.*” (Grieco, 1988:500; 1990). Dengan

demikian, keterlibatan negara tidak hanya digerakkan oleh keuntungan material, tetapi juga oleh peluang representasi yang memperkuat legitimasi posisi mereka dalam sistem internasional yang anarkis.

Voice opportunity beroperasi pada tingkat analisis menengah karena menghubungkan logika struktural neorealisme yang menekankan tekanan sistem internasional dengan perspektif institusionalisme yang menyoroti peluang partisipasi negara. Konsep ini menunjukkan bahwa meski kapabilitasnya terbatas, negara tetap dapat memainkan peran signifikan melalui mekanisme multilateral. Kompleksitas konsep ini tercermin dalam variasi peran: di satu sisi negara dapat berperan sebagai *follower* yang menyesuaikan diri dengan kepentingan kolektif, sementara di sisi lain tetap memiliki ruang untuk mengartikulasikan agenda perubahan meski dalam lingkup terbatas. Dengan demikian, *voice opportunity* menegaskan pentingnya dimensi partisipasi, representasi, dan artikulasi kepentingan yang sulit diwujudkan di luar institusi multilateral.

Konsep ini membantu menjelaskan pilihan Indonesia bergabung dengan BRICS sebagai sarana strategis di tengah rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok. Indonesia tidak berada pada posisi untuk menentukan arah tatanan global, melainkan lebih menempati posisi *following* terhadap dinamika struktural sambil mengartikulasikan kepentingan nasionalnya melalui *platform* representasi kolektif. Pilihan ini sejalan dengan asumsi RAM, di mana keputusan Indonesia mencerminkan kalkulasi rasional untuk memperoleh manfaat politik dan diplomatik dari BRICS tanpa harus memutus hubungan dengan institusi yang didominasi Barat. Dengan kata lain, perilaku Indonesia dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi strategis yang menjaga peran sebagai *status quo seeker* dalam sistem internasional, sembari membuka kemungkinan *revisionist* melalui suara kolektif *Global South*.

Kerangka *voice opportunity* digunakan sebagai alat operasional untuk mengidentifikasi indikator konkrit dari perilaku Indonesia di BRICS, seperti pola partisipasi, intensitas representasi, serta kecenderungan sebagai *follower* dalam arus negara berkembang. Kerangka ini tidak berdiri sendiri, melainkan dikaitkan dengan Model Aktor Rasional (RAM) dan Neorealisme Struktural guna

menunjukkan bagaimana pilihan Indonesia lahir dari kalkulasi rasional sekaligus respons terhadap tekanan sistem internasional.

1.5.6 Revisionist vs. Status Quo Power

Studi hubungan internasional mengklasifikasikan negara-negara ke dalam dua kelompok utama berdasarkan sikap mereka terhadap struktur global yang berlaku, yakni *status quo seekers* dan *revisionist powers*. Klasifikasi ini berakar pada premis bahwa sistem internasional bersifat hierarkis dan menghasilkan distribusi keuntungan yang tidak merata (Organski & Kugler, 1981).

Negara *status quo seeker* cenderung menerima tatanan yang ada karena mereka diuntungkan dari struktur kekuasaan dan norma internasional saat ini, seperti keberadaan institusi *Bretton Woods*, yaitu: IMF, *World Bank*, dan WTO, yang menopang stabilitas sistem liberal global (Ikenberry, 2005; Schweller, 1994: 72). Sebaliknya, negara *revisionist* menilai posisinya kurang diuntungkan dalam sistem internasional, sehingga terdorong untuk mengubah norma dan struktur global, baik secara bertahap maupun konfrontatif (Buzan & Lawson, 2014; Schweller, 1994). Strategi *revisionist* dapat diwujudkan secara evolusioner (bertahap) maupun revolusioner (cepat dan konfrontatif), untuk memperoleh pengakuan lebih besar atas kepentingan nasional mereka (Panda, 2021).

Tiongkok, misalnya, dianggap sebagai *revisionist moderate* karena membangun alternatif seperti BRICS dan *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), serta menginisiasi dedolarisasi, yang menunjukkan pergeseran normatif tanpa konfrontasi langsung (Jones, 2023; Panda, 2021). Langkah-langkah ini menegaskan bahwa strategi *revisionist* tidak selalu konfrontatif, melainkan dapat diwujudkan melalui mekanisme kelembagaan paralel terhadap sistem yang ada.

Indonesia secara historis diposisikan sebagai *status quo seeker*, tercermin dari keterlibatannya dalam berbagai institusi global konvensional dan ketergantungannya pada sistem ekonomi internasional (Ikenberry, 2018; Menegazzi, 2020). Namun, keterlibatan Indonesia dalam forum alternatif seperti BRICS dan seruan untuk reformasi tata kelola global menunjukkan adanya sinyal pergeseran normatif menuju posisi yang lebih *adaptive revisionist*.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori *status quo vs revisionist power* yang dioperasionisasikan dalam lima indikator konseptual (Schweller, 1994, 2015) Buzan & Lawson (2014) dan Panda (2021):

- 1) *Level of participation*, yaitu sejauh mana Indonesia aktif di lembaga internasional konvensional maupun alternatif;
- 2) *Level of obedience*, yang mengukur kepatuhan terhadap norma internasional yang berlaku;
- 3) *Response to power redistribution*, yakni sikap terhadap pergeseran kekuatan global yang mencerminkan keberpihakan normatif;
- 4) *Modified structural rules within international organization*, sejauh mana negara mematuhi hukum internasional tetapi tetap mencari peluang memodifikasi aturan struktural lembaga agar sesuai kepentingan nasional;
- 5) *Military instruments*, intensitas penggunaan instrumen militer untuk memajukan kepentingan, lebih menonjol pada *revisionist state* dibanding *status quo seeker*.

Dua indikator terakhir tidak dijadikan fokus utama, karena topik skripsi berpusat pada kalkulasi ekonomi-politik Indonesia dalam keputusan bergabung dengan BRICS. Analisis difokuskan pada tiga indikator pertama yaitu: dimensi institusional, kepatuhan normatif, serta respons terhadap distribusi kekuatan global, karena secara langsung relevan dengan konteks keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS. Indikator ke-4 dan ke-5 tidak dijadikan fokus karena: (a) modifikasi aturan struktural lembaga internasional tidak signifikan dalam kasus Indonesia, dan (b) instrumen militer tidak digunakan sebagai alat utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia di forum BRICS. Dengan demikian, fokus pada tiga indikator utama memungkinkan analisis lebih tajam dan tetap sesuai kerangka teori, tanpa mengurangi relevansi konseptual penelitian.

Secara konseptual, Indonesia tetap menjaga kepatuhan terhadap tatanan global konvensional, yang dapat dilihat melalui keterlibatannya di lembaga ekonomi internasional seperti IMF. Namun, untuk memastikan analisis bersifat *apple to apple*, penelitian ini menitikberatkan pada perilaku Indonesia dalam BRICS dan membandingkannya dengan praktik negara-negara OECD di forum

serupa. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang lebih akurat terhadap posisi Indonesia: apakah keputusan bergabung dengan BRICS mencerminkan strategi *adaptive revisionist/moderate revisionist*, yang berusaha mendorong perubahan normatif secara bertahap, atau tetap konsisten dalam kerangka *status quo* dengan strategi diplomasi adaptif.

Dengan demikian, fokus pada tiga indikator utama memungkinkan analisis yang tajam dan sistematis, tetap konsisten dengan kerangka teori *status quo vs adaptive revisionist*, serta relevan dengan data yang akan digunakan. Penekanan pada perbandingan dengan OECD memastikan bahwa temuan penelitian dapat dianalisis secara proporsional, membedakan antara kepatuhan struktural terhadap tatanan global yang ada dan peluang strategis dalam forum alternatif seperti BRICS.

1.6 Asumsi Penelitian

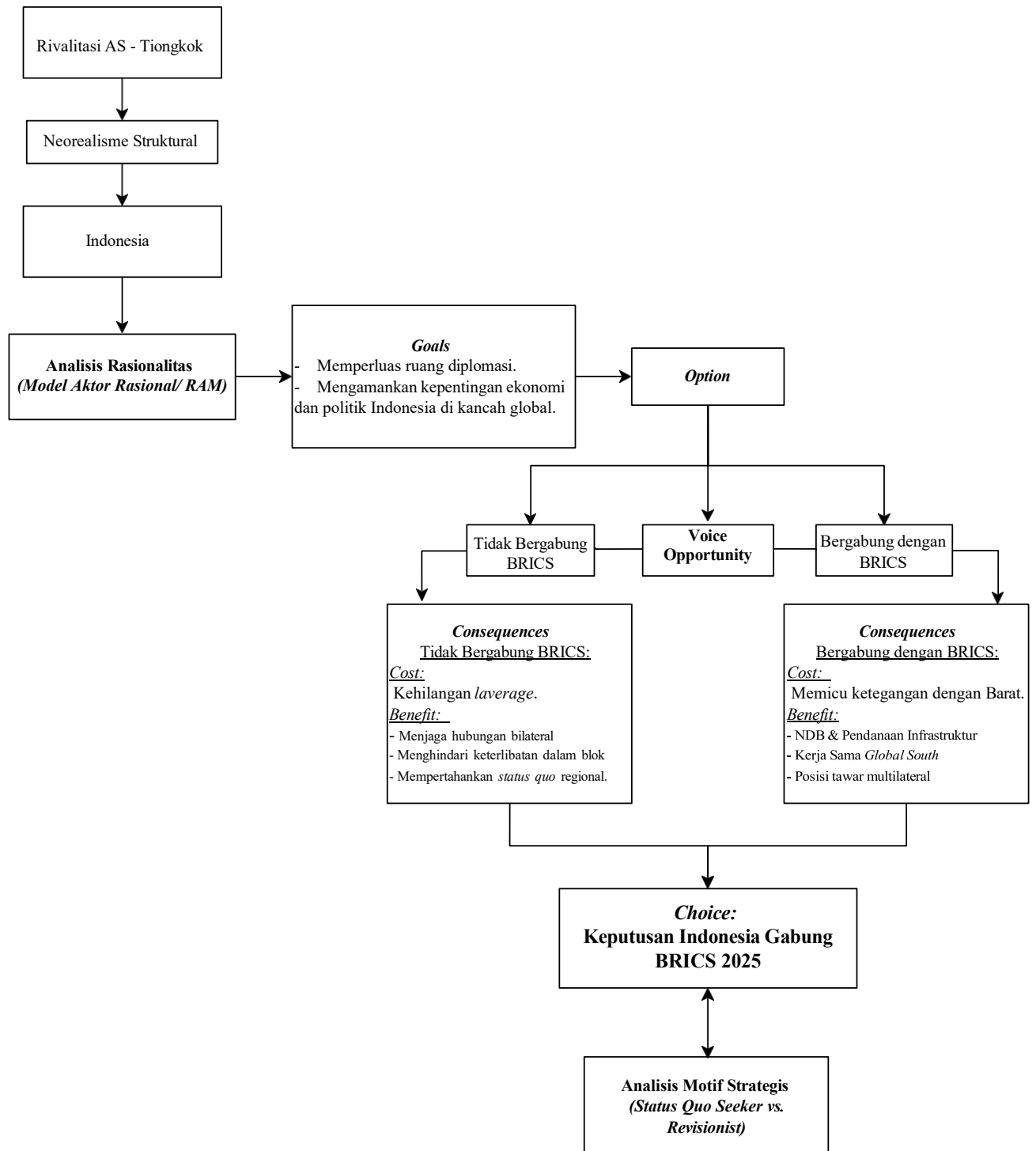
Penelitian ini berasumsi bahwa keputusan Indonesia bergabung dengan BRICS pada 2025 merupakan hasil kalkulasi rasional sebagaimana dijelaskan dalam Model Aktor Rasional (RAM), bukan keputusan yang bersifat tiba-tiba atau ideologis. Indonesia dipandang sebagai middle power yang menavigasi tekanan struktural dari rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok dengan strategi adaptif.

Asumsi utama penelitian adalah bahwa keterlibatan Indonesia dalam BRICS didorong oleh tiga faktor: (1) kebutuhan untuk memperluas ruang manuver diplomatik dan ekonomi di luar dominasi institusi keuangan Barat, (2) ketidakpuasan terhadap bias struktural dalam tatanan keuangan global yang terefleksi dalam kasus sengketa dagang dan kebijakan tarif tinggi terhadap produk ekspor Indonesia, serta (3) peluang representasi kolektif yang ditawarkan BRICS bagi negara-negara berkembang untuk menyuarakan kepentingan melalui *voice opportunity*.

Dengan demikian, penelitian ini mengasumsikan bahwa perilaku Indonesia dalam BRICS tidak semata-mata bertujuan *revisionist* untuk mengganti tatanan internasional, tetapi lebih pada posisi *following* dengan memanfaatkan peluang representasi dan kalkulasi pragmatis. Namun, keterlibatan aktif ini tetap membuka ruang bagi interpretasi bahwa Indonesia dapat memainkan peran dalam

memperkuat dinamika multipolaritas, khususnya terkait isu dedolarisasi dan restrukturisasi tata kelola global.

1.7 Kerangka Analisis



Gambar 1.2 Kerangka Analisis

Sumber: Diolah Penulis, 2025

Kerangka analisis penelitian ini memetakan keputusan Indonesia untuk bergabung dengan BRICS pada 2025 sebagai respons strategis terhadap tekanan struktural dalam sistem internasional. Rivalitas Amerika Serikat–Tiongkok menciptakan dinamika transisi kekuasaan global yang dianalisis melalui perspektif Neorealisme Struktural (Waltz, 1979), yang menekankan sifat anarkis sistem internasional dengan distribusi kapabilitas sebagai determinan utama perilaku negara. Pertarungan ide antara tatanan liberal yang dipertahankan Amerika Serikat dan alternatif multipolar yang didorong Tiongkok menghasilkan tekanan sistemik yang menempatkan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam dilema strategis untuk menavigasi peluang dan risiko tanpa kehilangan otonomi kebijakan.

Konsep Model Aktor Rasional (RAM), Indonesia diposisikan sebagai aktor rasional yang menetapkan tujuan memperluas ruang diplomasi serta mengamankan kepentingan ekonomi-politik di tingkat global. Dari kalkulasi rasional ini, terdapat dua alternatif kebijakan: tetap berada dalam orbit institusi yang didominasi Barat atau bergabung dengan BRICS, dengan konsekuensi *cost–benefit* yang berbeda. Pada titik ini, konsep *voice opportunity* (Grieco, 1988) menjelaskan bagaimana Indonesia, alih-alih mendeterminasi tatanan global, menempati posisi *following* dengan memanfaatkan ruang representasi yang ditawarkan forum multipolar untuk menyampaikan kepentingannya.

Keputusan akhir Indonesia untuk bergabung dengan BRICS kemudian dievaluasi dalam kerangka pertanyaan normatif: apakah langkah ini mencerminkan posisi *status quo seeker* yang berusaha mempertahankan stabilitas tatanan internasional, atau justru menunjukkan kecenderungan *revisionist* melalui keterlibatan dalam suara kolektif negara-negara berkembang. Dengan demikian, kerangka analisis ini mengintegrasikan tiga dimensi utama: tekanan struktural sistem internasional, kalkulasi rasional negara sebagai aktor, serta motif normatif, untuk memahami secara komprehensif dinamika kebijakan luar negeri Indonesia dalam era multipolaritas dan rivalitas kekuatan besar.